

Analisa yuridis kewenangan lelang eksekusi secara mandiri terhadap objek jaminan fidusia oleh Perum Pegadaian / Agus Tiarman

Agus Tiarman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269990&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah kewenangan pelaksanaan lelang eksekusi secara mandiri atas objek jaminan fidusia oleh PERUM Pegadaian. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang disusun secara deskriptif analitis. Lelang Eksekusi merupakan bentuk dari penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan oleh negara dalam hal ini oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), hal ini tegas diatur dalam Vendu Reglement stbl no 189 tahun 1908, Vendu Instructie stbl No 190 tahun 1908 beserta peraturan pelaksana lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PERUM Pegadaian memiliki kewenangan untuk melakukan lelang eksekusi secara mandiri tanpa campur tangan KP2LN berdasarkan ketentuan lex specialist yang diatur dalam Pandhuis Reglement stbl No 81 Tahun 1928 yang menyatakan bahwa Hoofdt Pandhuisdienst (Direktur Pegadaian) berhak mengatur sendiri lelang yang dilakukan oleh Pegadaian. Meskipun pada awalnya ketentuan ini dimaksudkan terbatas untuk objek jaminan gadai yang ada di PERUM Pegadaian, namun seiring perkembangan bisnis PERUM Pegadaian juga menyalurkan kredit dengan jaminan fidusia. Terhadap objek jaminan fidusia ini pun PERUM Pegadaian berwenang melelang objek jaminan fidusia tersebut secara mandiri. Karena privilege yang diberikan Vendu Reglement dan Pandhuis Reglement adalah bertolak pemberian kewenangan kepada institusi Pegadaian nya bukan bertumpu khusus pada objek jaminan gadai. Sepanjang anggaran dasar perusahaan memperbolehkan PERUM Pegadaian melakukan pengikatan jaminan di luar jaminan gadai maka Pegadaian sah dan berwenang melakukan lelang secara mandiri.

<hr>

ABSTRACT

This research used library research which secondary data as its data resources. The main discussion point is PERUM Pegadaian Authority on Fiducia collateral object. This research is analyzed by description methode. Auction is a government law enforcement which is operated by Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), strictly regulated in Vendu Reglement staablaad No 189 Year 1908., Vendu Instructie Stbl no 190 Year 1908 and Ministry of Finance regulations. This study result

showed that PERUM Pegadaian has the Independent Executionary Auction Authority outside KP2LN intervention based on Lex specialist which stated in Pandhuist Reglement stbl No 81 1928 that Pegadaian President Director has the right to arrange Pegadaian auction independently. Though on its first application this regulation limited to its pawn collateral only, due to its business development PERUM Pegadaian provide fiduciary loan services for public, this causes Pegadaian has the authority to do an Independent Auction Excecution. Due to its privilege given by Vendu Reglement and Pandhuis Reglement, Perum Pegadaian authority is not only on its collateral pawn object. As long as the statute institution allowed PERUM Pegadaian to charge collateral outside its pawn business, Pegadaian legally has the Independent Auction Excecution Authority.